



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI IX DPR RI**

Tahun Sidang	:	2014-2015
Masa Persidangan	:	II
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat
Dengan	:	1. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PHI dan JSK) Kementerian Ketenagakerjaan RI; 2. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan (BARENBANG) Kementerian Ketenagakerjaan RI. 3. Direktur Jenderal Pengawasan Pembinaan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan RI.
Acara	:	Pendalaman Rincian Program dan Kegiatan RAPBN-P Tahun 2015 para Eselon I Kementerian Ketenagakerjaan RI
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari/tanggal	:	Kamis, 5 Februari 2015
Pukul	:	14.00 WIB – selesai
Ketua Rapat	:	H. Syamsul Bachri S., M.Sc/ Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Muhammad Yus Iqbal, SE/ Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi IX DPR-RI Lantai I Gedung Nusantara I Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Hadir	:	40 anggota

PIMPINAN KOMISI IX DPR RI :

1. Dede Yusuf Macan effendi, S.T, M.I.Pol (F-PD)
2. H. Syamsul Bachri, M.Sc (F-PG)
3. Pius Lustrilanang, S.IP, M.Si (F-P.Gerindra)
4. H. Asman Abnur, SE.,M.Si (F-PAN)
5. Dra. Ermalena, MHS (F.PPP)

F.PDIP :

6. Alex Indra Lukman
7. Hj. Elva Hartati, S.IP, MM
8. Daniel Lumban Tobing
9. H. Imam Suroso, S.Sos, SH, MM
10. Nursuhud
11. Abidin Fikri, SH
12. dr. Karolin Margret Natasa

F.PG :

13. Hj. Saniatul Lativa, SE
14. Hj. Dewi Asmara, SH, MH.
15. H. Budi Supriyanto, SH, MH
16. drg. Hj. Andi Fauziah Pujawatie Hatta, SKG

F.P.GERINDRA :

17. Khaidir
18. dr. H. Suir Syam, M.Kes
19. Susi Syahdonna Bachsin, SE, MM.
20. drg. Putih Sari
21. Roberth Rouw.

F.PD :

22. Drs. H. Zulfikar Achmad
23. Siti Mufattahah, Psi.
24. Drs. Ayub Khan.
25. Hj. Aliyah Mustika Ilham, SE.

F.PAN :

26. Ir. H.A. Riski Sadig
27. Dr. H.M. Ali Taher Parasong, SH, M.Hum
28. Hang Ali Saputra Syah Pahan, SH

F.PKB :

29. H. Marwan Dasopang
30. H. Handayani, SKM
31. Hj. Nihayatul Wafiroh, MA
32. Dra. Hj. Siti Masrifah, MA

F.PKS :

33. Ansory Siregar, Lc
34. Drs, H. Chairul Anwar, Apt
35. Drs. H. Hamid Noor Yasin, MM

F.PPP :

36. H. Muhammad Iqbal, SE, M.Com
37. Dra. Hj. Okky Asokawati, M.Si.

F.P.NASDEM :

38. Ir. Ali Mahir, MM
39. Amelia Anggraini

F.P. HANURA :

40. Capt. Djoni Rolindrawan, SE.,M.MAR, MBA

UNDANGAN :

1. R. Irianto Simbolon, SE, MM (Dirjen PHI dan Jamsos Kemenaker RI) beserta jajaran.
2. Drs. A. Mujihandaya, M.Si (Dirjen Pengawasan Pembinaan Ketenagakerjaan Kemenaker RI) beserta jajaran
3. Ir. Sugiarto Sumas, MT (Kepala Barenbang Kemenaker RI) beserta jajaran.

RAPAT DIBUKA PUKUL 14.45 WIB

KETUA RAPAT ((F-PD/DEDE YUSUF M.E., ST, M.I.Pol):

...(suara tidak terekam)...

DIRJEN PHI DAN JAMSOS:

...yang dimuat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara tahun 2015 ini.

Bapak Pimpinan, kami disini juga lengkap bersama dengan seluruh eselon II di Direktorat Dirjen PHI dan Jamsos, oleh karenanya kami menyampaikan pokok bahasan ada 3 besar, yang pertama, kami akan menyampaikan struktur organisasi Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, mengapa ini kami sampaikan supaya Bapak dan Ibu bisa melihat dimana kekuatan-kekuatan dari struktur organisasi ini dalam melaksanakan, menciptakan maupun membuat suasana yang lebih kondusif. Kemudian yang kedua, kami juga beranjak menyusun program dan kegiatan ini dari referensi yaitu capaian-capaian yang sudah kita lakukan bersama di tahun 2014 baik dari kegiatan yang pusat maupun juga yang dekonsentrasi di 33 provinsi. Kemudian kami akan juga menyampaikan sebagai dukungan bagaimana rencana-rencana 2015 ini bisa kita capai tentu ada hal-hal yang kita lakukan bersama dalam rangka pelaksanaan program pengembangan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja ditahun 2015.

Bapak Pimpinan, Anggota yang kami hormati,

Inilah struktur organisasi Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial saat ini ada 5 unit eselon II. Ini komposisi yang sekarang yang existing sekarang yaitu ada Sekretariat Direktorat Jenderal kemudian Direktorat Persyaratan Kerja, Kesejahteraan dan Analisis Diskriminasi kemudian ada Direktorat Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Khusus yang kotak kedua ini, Bapak Pimpinan dan Anggota yang kami muliakan, kita berencana seiring dengan perkembangan regulasi kebijakan dan kebutuhan masyarakat yang begitu tinggi maka kami mengusulkan Direktorat Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja ini menjadi dua direktorat, artinya dipisah dia, karena situasi perkembangan mengenai pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana kita ketahui sudah sepatasnya tidak lagi dikendalikan ataupun dikelola oleh satu direktorat tapi oleh dua direktorat untuk itu nanti juga mohon dukungan.

Kemudian Direktorat Kelembagaan dan Kemasyarakatan Hubungan Industrial dan yang terakhir Direktorat Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Inilah 4 direktorat teknis dan satu unit

penunjang didalam mengelola program-program dan kegiatan Ditjen Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial.

Ini rencana kami yang sudah kami usulkan Pak Pimpinan, nanti kami mohon dukungan nanti. Kami akan menyampaikan capaian program pengembangan hubungan industrial ditahun 2014. Ini ada 2 besar kita bersyukur karena ada kemajuan Pak Pimpinan, realisasi anggaran maupun presentasi itu sekitar 86% di yang alokasi di Ditjen PHI dan Jamsos yang terdiri dari pusat 84,38% dan dekosentrasi 89,21%. Ini juga menjadi perhatian yang di dekonsentrasi karena kita juga ingin persoalan-persoalan hubungan industrial dan jaminan sosial ini sebagaimana kita ketahui bersama akhir-akhir ini lebih banyak naik ke tingkat pusat atau ke Jakarta, padahal menurut ketentuan mekanisme yang berlaku sedianya permasalahan hubungan industrial itu ditangani terlebih dahulu oleh Dinas Kabupaten kemudian Dinas Provinsi baru ditingkat pusat.

Nah ini yang terjadi Bapak dan Ibu sekalian, kebanyakan persoalan-persoalan itu belum ditangani oleh kabupaten dan provinsi, teman-teman pekerja buruh maupun pengusaha sudah langsung minta kepada menteri atau kepada dirjen untuk difasilitasi atau diselesaikan. Ini gambaran realisasi anggaran pusat dan daerah Ditjen PHI dan Jamsos tahun anggaran 2014. Kami juga mempersiapkan bahan sebetulnya Pak Pimpinan secara detail bagaimana realisasi atas pagu yang teralokasi di dekon untuk 33 provinsi ini ada rinciannya nanti kami buat menurut rangking Pak Pimpinan jadi ini Sulawesi Tengah rangking pertama, Sulawesi Utara kedua, Maluku Utara ketiga dan seterusnya. Sementara rangking yang terakhir yang ke-33 yaitu Kalimantan Timur. Ini serapannya kurang lebih 67%. Inilah gambaran mengenai kondisi realisasi di dekosentrasi 33 provinsi.

Yang terhormat Bapak dan Ibu Anggota Komisi IX DPR RI,

Selanjutnya kami menyampaikan capaian program dan kegiatan tahun 2014. Tentu kami beranjak melaksanakannya mengikuti apa yang telah ditetapkan dalam Reinstra kita. Oleh karenanya ada indikator kinerja yang pertama yang bisa kita lihat sama-sama kita simak ditahun 2014, kita menargetkan pengesahan pembuatan peraturan perusahaan di Indonesia itu target kita adalah 2000 naskah peraturan perusahaan. Tapi puji syukur realisasi yang kita capai itu 254% Bapak Pimpinan, ini realisasinya 5.086 naskah peraturan perusahaan. Inilah kinerja-kinerja yang kami sampaikan untuk bisa menjadi pertimbangan kepada kita bersama didalam menggerakkan seluruh komponen-komponen stakeholder kita untuk bisa menuju hubungan industrial yang harmonis.

Sementara yang kedua, sebagaimana sarana hubungan industrial yang diperintahkan dalam Undang-undang 13/2003 ada 8 sarana itu mengenai pendaftaran perjanjian kerja bersama antara serikat pekerja dan pengusaha itu juga melebihi dari target yang telah kita tetapkan. Ini sesuatu yang cukup baik menurut hemat kami seperti target PKB itu 250 naskah PKB yang hasil perundingan-perundingan bersama, nah, kemudian realisasinya itu 260% atau 649 kesepakatan antara pengusaha dan pekerja.

Kemudian yang kita inginkan kedepan juga baik PP maupun PKB ini bisa terus bertambah selain bertambah juga ada perubahan kualitas maupun kuantitasnya. Ini seiring dengan jumlah serikat pekerja ditingkat perusahaan sekarang jumlah perusahaan di Indonesia kurang lebih 217.000 perusahaan tentu dengan ada kualifikasi besar, menengah dan kecil kemudian juga ada yang sudah mempunyai serikat pekerja maupun yang belum. Kalau yang belum ada serikat pekerja itulah yang dinomor 1 kita perlu menetapkan peraturan perusahaannya. Ini sebagaimana perintah undang-undang. Sementara di perusahaan yang sudah ada serikat pekerja itu harus dibuat perjanjian kerja bersama. Inilah gambaran sampai sekarang jumlah serikat pekerja ditingkat perusahaan kurang lebih 12.000 ditingkat perusahaan. Kalau ini sekarang jumlah PKB, bukan partai Pak, jumlah Perjanjian Kerja Bersama, Bu Nur, 11.000 an Pak Pimpinan, berarti masih ada target-target kita yang bisa kita kejar. Dalam perjalanannya juga selalu terbentuk serikat pekerja yang baru.

Kemudian yang ketiga, indikator kinerja kita dan bisa diukur adalah jumlah perusahaan yang menerapkan kesetaraan ditempat kerja. Ini juga sebagaimana perintah dari Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-undang 13/2003 kemudian juga atas konvensi ILO yang sudah kita ratifikasi tidak boleh adanya diskriminasi dalam bentuk apapun diperusahaan. Ini kita juga sudah bisa melakukan pembinaan dan membentuk semacam satuan tugas-satuan tugas termasuk juga membuat ketentuan itu masuk dalam Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama, misalnya Bapak Pimpinan, tidak boleh ada diskriminasi mengenai upah, tidak boleh ada diskriminasi mengenai pelatihan, dan seterusnya dan seterusnya. Ini tahun 2014, ini juga mencapai 100% lebih dari target.

Yang berikut, kita juga telah melakukan pembentukan-pembentukan lembaga kerjasama Bipartit ditingkat perusahaan. Ini rencana kita di 2014, 400 lembaga dan syukur *Alhamdulillah* bisa terealisasi dibentuk 792 lembaga artinya mendekati 200% apa yang menjadi tugas-tugas dan fungsi kita baik di jajaran pusat maupun provinsi kabupaten kota bisa memfasilitasi dibentuknya LKS Bipartit sebagai wadah musyawarah untuk menyelesaikan segala permasalahan maupun gagasan dan ide apa yang menjadi kepentingan kebutuhan perusahaan bersama-sama dengan serikat pekerja maupun para pekerjanya.

Kemudian yang kelima, indikator kinerja yang kelima, Bapak dan Ibu, adalah pembentukan lembaga kerjasama Tripartit, ini kan plus Pemerintah. Ya ini memang target kita sebetulnya 52 lembaga namun dalam realisasi di 2014 ada ketidakcapaian hanya mencapai 42%. Ini menjadi bahan kita pertimbangan kita supaya kami bisa lebih bagus lagi untuk menerapkan maupun membangun terbentuknya LKS Tripartit di kabupaten kota. Alasan yang klasik Pak Pimpinan ini tidak bisa mencapai target bukannya kemauan yang tidak ada tetapi nanti dalam operasional kalau LKS itu dibentuk tidak tersedianya anggaran untuk operasional sehari-hari. Itu yang menjadi alasan maka enggan kabupaten kota membentuk LKS Tripartitnya. Namun dengan upaya Menteri Ketenagakerjaan beberapa waktu lalu telah dikomunikasikan kepada Menteri Dalam Negeri Dirjen Dalam Negeri sudah membuat, Dirjen Anggaran Kementerian Dalam Negeri sudah membuat surat ke seluruh gubernur untuk mendukung pembentukan LKS Tripartit termasuk juga

mendukung pembentukan Dewan Pengupahan termasuk juga untuk biaya operasional lembaga-lembaga Tripartit yang ada di daerah-daerah.

Kemudian yang keenam, indikator kinerja yaitu peningkatan kapasitas Anggota LKS Bipartit dan Tripartit ini juga mendekati 100% kemudian jumlah SDM yang telah mengikuti pelatihan tentang hubungan industrial ini juga melebihi target realisasinya. Kemudian bagaimana upaya kita penyelesaian terhadap dispute di luar pengadilan hubungan industrial melalui mediasi ini juga melebihi target. Kemudian jumlah tenaga kerja yang bekerja dalam hubungan kerja yang menjadi peserta Jamsostek artinya yang formal maupun yang informal kita dorong terus untuk bisa menjadi Anggota Peserta di BPJS ini juga melebihi target.

Yang terakhir, indikator kinerja perusahaan yang menerapkan pengupahan berdasarkan perundingan dan atau penerapan struktur dan skala upah. Ini juga menjadi program kita di tahun 2015 ini supaya perusahaan-perusahaan terus membentuk dan membuat struktur dan skala upah. Contoh misalnya, bulan Januari lalu, Pak Menteri ada dengan kami Sidak ke salah satu perusahaan di daerah Jakarta Timur itu perusahaan besar ternyata masih belum membuat struktur dan skala upah. Ini langsung kita lakukan pembinaan dan Pak Menteri didalam memerintahkan supaya segera dibuat struktur dan skala upah di perusahaan tersebut. Ini juga mencapai ataupun melebihi target.

Bapak dan Ibu yang kami hormati,

Dari rangkaian beberapa indikator kinerja yang banyak syarat melebihi atau mencapai target namun tadi ada beberapa yang belum mencapai target tentu semua ada kekurangan kelemahan kami didalam menyelenggarakan itu dan secara umum penyerapan anggaran tahun 2014 di Ditjen PHI dan Jamsos tadi mencapai kurang lebih 87% tapi ada beberapa hambatan, kendala, antara lain:

1. Masih rendahnya penyerapan anggaran tahun 2014 artinya keinginan kita sepertinya mendekati 100% ini disebabkan kegiatan baru dapat dimulai pada bulan April 2014 karena adanya revisi pemblokiran anggaran oleh Kementerian Keuangan.
2. Anggaran yang diserap periode Januari hingga April 2014 terbatas pada belanja operasional seperti gaji pegawai, pemeliharaan serta langganan daya dan jasa.
3. Adanya instruksi Presiden No. 4 tahun 2014 tentang Langkah-langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian.
4. Cukup tingginya frekuensi, revisi anggaran.
5. Terdapat keterlambatan penetapan KPA di daerah.
6. Ini juga karena adanya mutasi-mutasi yang cukup tinggi menurut hemat kami mempengaruhi kepada pengelola keuangan.

Ini kondisi umum yang bisa kami narasikan Bapak dan Ibu Anggota yang kami hormati, sebagai tantangan kami sekiranya di tahun 2015 dengan rencana alokasi anggaran nanti sebesar 66 M itu kami akan upayakan untuk bisa mencapai target sebagaimana yang telah ditetapkan.

Yang terakhir, Bapak dan Ibu Anggota yang kami hormati, inilah rencana capaian program pengembangan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja tahun 2015. Kiranya Bapak dan

Ibu Anggota Dewan bisa nanti memberikan arahan maupun pandangan dan dukungan lebih konkrit lagi.

Yang pertama, kegiatan pengelolaan kelembagaan dan kerjasama hubungan industrial yang kami rencanakan sebesar 85 milyar, sarannya terciptanya hubungan industrial yang harmonis antara serikat pekerja dan pengusaha. Tentu berbagai item indikator yang bisa kita jadikan acuan untuk melaksanakannya. Tentu juga semua ada target-target yang menjadi pegangan bagi pengelola maupun para petugas maupun pegawai di lingkungan Ditjen PHI dan Jamsos sampai juga dengan di provinsi dan kabupaten kota.

Sementara kegiatan yang kedua adalah peningkatan penerapan pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang direncanakan sebesar 65 milyar. Ini dengan berbagai sasaran bisa kami sampaikan disini, yang pertama, tersedianya program perlindungan sosial bagi pekerja. Kemudian yang kedua, tersedianya kebijakan pengupahan sebagai payung hukum. Yang ketiga, tersusunnya kebijakan peraturan pengupahan yang adil, simple dan berkepastian.

Sebagai informasi, Bapak dan Ibu yang kami hormati, saat ini kami juga sedang *finishing* mengenai berbagai RPP ataupun berbagai program dari BPJS ketenagakerjaan ada 4 program, moga-moga dalam waktu dekat 4 program ini bisa ditetapkan oleh Pemerintah menjadi Peraturan Pemerintah yaitu Program Jaminan Hari Tua, Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Program Jaminan Kematian dan satu program yang baru yang kita sebut dengan Program Jaminan Pensiun sebagai amanat dari Undang-undang No. 40 dan Undang-undang 24. Ini sedang kita bahas walaupun sedikit dari berbagai kalangan Serikat Pekerja masih ingin pembulatan atas kontribusi iuran, iuran pasti dan maupun juga nanti manfaat pasti didalam Program Jaminan Pensiun.

Kemudian kegiatan besar yang ketiga yaitu konsolidasi, pelaksanaan peningkatan intensitas pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan anggaran yang kami usulkan sebesar Rp 51.308.347.000,-.

Ibu dan Bapak yang kami hormati,

Di 2015 juga karena banyaknya persoalan-persoalan didalam hubungan industrial maka kami juga membuat suatu sasaran di 2015 ini dalam rangka pencegahan kemudian penyelesaian dan juga langkah tindak lanjut dari persoalan-persoalan yang dihadapi oleh pengusaha maupun pekerja buruh. Maka sarannya adalah penerapan prinsip-prinsip hubungan industrial dalam pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Oleh karenanya Bapak dan Ibu yang kami hormati, tahun ini juga kita akan ada program bagaimana teman-teman kita para pekerja buruh itu paham ketika dia beracara di PHI di Pengadilan Hubungan Industrial. Jadi kemarin saya sempat juga ngobrol dengan Pak Ketua, Pak Dede bagaimana yaitu Pak, kami ada program di 2015 ini *new program* nanti teman-teman pekerja buruh kita fasilitasi memahami ketika dia beracara di PHI di Pengadilan Hubungan Industrial. Supaya sewaktu nanti proses pengadilan, proses sidang di PHI itu semua pihak bisa lebih tahu, lebih

memahami apa yang harus dia persiapkan, bagaimana dia menghadapi hakim dan sebagainya atau menghadapi pihak yang penggugat maupun yang tergugat. Ini program nanti mohon dukungan Bapak dan Ibu supaya teman-teman kita pekerja buruh yang tujuan dari bagaimana penyelesaian hubungan industrial ini cepat, murah dan tepat itu betul-betul bisa kita wujudkan.

Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu, di tahun 2015 juga ada program yang menurut hemat kami program besar karena nanti di Januari 2016 itu akan berakhir 143 hakim adhoc di Pengadilan Hubungan Industrial yang terdiri dari 2 komponen atau 2 unsur kurang lebih 70 itu nanti dari unsur pengusaha kemudian kurang lebih 70 an juga dari unsur pekerja buruh. Ini akan berakhir, mereka-mereka nanti akan melakukan tugas-tugas di Pengadilan sebagai Hakim Adhoc itu akan berakhir 143 orang maka tahun ini juga mohon dukungan nanti kami akan melakukan seleksi Hakim Adhoc, kita akan lakukan penjarangan-penjarangan dari seluruh Indonesia dari 33 provinsi yang ada. Tentu harapan kita hakim-hakim nanti adalah hakim yang betul-betul memberikan keputusan yang seadil-adilnya kepada semua pihak.

Kemudian Bapak dan Ibu yang kami hormati, kegiatan yang berikut adalah pengelolaan persyaratan kerja, kesejahteraan dan analisis diskriminasi ini dengan indikator dan sasaran meningkatnya kesejahteraan pekerja buruh melalui penerapan syarat kerja non diskriminasi. Ini tugas-tugas kita sebagaimana fungsi-fungsinya, pembinaan kemudian juga melaksanakan kebijakan kemudian merumuskan dan melakukan bimbingan-bimbingan kepada pihak-pihak termasuk tadi akan memfasilitasi pembuatan peraturan perusahaan juga pembuatan perjanjian kerja bersama serta juga bimbingan didalam pelaksanaan *out sourcing* termasuk bagaimana kita menciptakan kesetaraan ditingkat perusahaan.

Oleh karenanya, Bapak dan Ibu yang kami hormati, pengelolaan persyaratan kerja, kesejahteraan dan analisis diskriminasi ini rencananya alokasi yang kami inginkan sebesar Rp 41.416.994.000,- tentu dari pengalaman kami di 2014 hampir seluruh kegiatan itu mencapai target dan ada yang melebihi target.

Kemudian yang terakhir kegiatan yaitu dalam rangka dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya di Ditjen PHI dan Jamsos ini seperti gaji 13 kemudian remunerasi kemudian juga biaya dalam rangka hubungan internasional kemudian Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah karena sebagaimana diketahui kita setiap tahun ada konferensi perburuhan internasional di Genewa, tugas kamilah yang menyiapkan bagaimana sidang itu sebagai delegasi Republik Indonesia kita bisa membuat bahan kemudian juga bisa menginformasikan dan pembahasan-pembahasan baik di Indonesia maupun selama berlangsung konferensi di Genewa. Ini kita rencanakan sebesar 122 milyar termasuk juga rencana penyusunan kajian dan sampai nanti kepada pokok-pokok pikiran dalam rangka kita melakukan perubahan-perubahan Undang-undang 13/2003 sehubungan dengan sudah ada 15 yudisial review yang ke Mahkamah Konstitusi. Sehingga patut kita bersama-sama nanti Bapak dan Ibu perlu kami informasikan sejenak disini sudah ada 15 yudisial review ke Mahkamah Konstitusi dengan 1 ketetapan, 12 putusan dan 2 permohonan dalam proses dimana 12 putusan yang kami infokan ini sudah ada, dengan

keputusan sebagai berikut: 8 keputusan dikabulkan dan 4 putusan ditolak ini dengan berbagai pasal ada kurang lebih 15 tadi mengenai kesalahan berat, mengenai upah proses, mengenai komposisi SPSB kemudian mengenai Jaminan Sosial Tenaga Kerja, mengenai *out sourcing*, mengenai PHK, mengenai hak-hak pekerja buruh jika di PHK dan pembayaran upah kemudian mengenai kadaluwarsa tuntutan juga mengenai upah sebagai hak, kemudian juga ada berbagai lagi yang terkait dengan upah minimum, kebutuhan hidup layak dan seterusnya, dan seterusnya dan terakhir ini mengenai bagaimana pekerja yang mengundurkan diri dengan secara baik-baik.

Sejalan dengan itu kami berpikir dimana tadi faktor yang pertama itu adalah juga keinginan masyarakat baik masyarakat pengusaha dan pekerja buruh. Faktor yang kedua, tadi adalah dengan adanya 15 yudisial review, ketiga juga dengan situasi perkembangan saat ini maupun kedepan maka patut sudah kita sama-sama memikirkan kajian dalam rangka merevisi Undang-undang 13/2003. Sehingga kami merencanakan tahun ini kita melakukan berbagai rangkaian-rangkaian FBD, *growth is got ..(tidak jelas)*..diskusi kemudian kajian-kajian dan nanti mengeluarkan pokok-pokok pikiran dan kita harapkan tahun depan sudah bisa tersusun NA nya, Naskah Akademisnya dan harapan kami di 2017 sudah bisa kita bahas di DPR.

Itu antara lain didukung manajemen dan dukungan teknis yang sebesar 122 milyar. Termasuk juga Bapak dan Ibu yang kami hormati, berbagai persoalan yang kita hadapi bersama terkait dengan bagaimanapun existensi serikat pekerja, serikat buruh baik yang ditingkat perusahaan, di luar perusahaan yang disebut dengan federasi maupun confederasi nampaknya kita juga perlu bersama-sama melihat kembali undang-undang yang mengatur ini Undang-undang No. 21 tahun 2000 yaitu Undang-undang tentang Serikat Pekerja, Serikat Buruh, ini hasil kajian maupun sementara, maupun masukan-masukan dari berbagai pihak perlu kita lakukan duduk bersama untuk memikirkan, menyesuaikan undang-undang ini untuk bisa mengakomodir kepentingan di masa yang akan datang.

Contoh, misalnya yang sederhana, undang-undang ini mengatur dapat membentuk serikat pekerja ditingkat perusahaan 10 orang. Logikanya kalau di perusahaan 2000 orang pekerja berarti bisa tercipta atau terbentuk disitu 200 serikat pekerja. Bayangkan Bapak dan Ibu kalau kita seorang pengusaha kalau 200 SP setahun itu 12 bulan berarti ini 1 bulannya kurang lebih mengurus 20 SP berarti ini kan sudah habis lah waktu kita sementara kita perlu operasional bagaimana kinerja dan seterusnya.

Dalam rangka itu, Bapak dan Ibu kami juga berpikir kita perlu telaah mengenai Undang-undang 21 tahun 2000 yang seperti Ibu Irma paham betul mengenai Serikat Pekerja, Serikat Buruh misalnya, bukannya kita memperkecil ataupun mengurangi hak-hak dari berserikat, bukan, tapi kita coba membuat keharmonisan Serikat Pekerja itu justru menjadi mitra yang kuat didalam perusahaan dalam rangka membangun kinerja-kinerja kedepan. Maka perlu kita lakukan juga telaahan terhadap undang-undang ini yang sudah kami alokasikan didalam dukungan manajemen di 122 milyar ini.

Bapak dan Ibu yang kami hormati,

Secara garis besar dengan tadi ada 5 kegiatan kalau bisa kami buat ke dalam suatu pengalokasian anggaran di tahun 2015 menurut unit kerja yang ada dan juga kepada dekonsentrasi sebagai berikut; ini Setditjen ataupun kelompok pusat, kelompok pusat itu sekitar 247. Pusat itu 247 milyar jika dibandingkan dengan tahun 2014 ada kenaikan 38% yang terdiri dari Setditjen 95 milyar, kemudian di PKKAD 31, kemudian KPHI 36 milyar, di PGS 41 milyar, di P3HI 42 milyar dan dekonsentrasi sebesar 118 milyar. Jadi kurang lebih demikian posisi-posisi pengalokasian anggarannya. Kami juga sudah menyiapkan sebetulnya perincian menurut alokasi anggaran di dekonsentrasi yang 33 provinsi.

Itulah Ibu dan Bapak terlebih lagi Bapak Pimpinan dan Ibu Pimpinan Sidang di Rapat Dengar Pendapat dengan kami Ditjen PHI dan Jamsos mengenai program dan kegiatan tahun 2015. Semoga penjelasan kami ini bisa melengkapi dan menjadi bahan pertimbangan Bapak dan Ibu untuk memperkuat dukungan kepada pelaksanaan di 2015. Harapan kami Bapak dan Ibu bisa tentu menyetujui semua ini untuk bisa kami laksanakan di awal tahun 2015. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Terima kasih.

Selanjutnya kami persilakan Kepala Badan Penelitian.

DIRJEN BALITFO:

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita sekalian dan selamat sore.

Bapak Pimpinan Komisi IX yang kami muliakan beserta Ibu Pimpinan. Anggota Komisi IX yang terhormat.

Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih atas diberikannya waktu untuk memaparkan tentang kegiatan di lingkungan Badan Penelitian dan Informasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR RI pada hari ini. Inilah adalah merupakan kelanjutan dari Rapat Kerja dengan Bapak Menteri Ketenagakerjaan yang dilaksanakan pada hari Selasa yang lalu dan kami mencoba untuk sedikit lebih menguraikan tentang kegiatan yang masuk dalam program di lingkungan Badan Penelitian dan Informasi. Badan Penelitian dan Informasi ini adalah terminologi nama lama ketika namanya masih Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tapi kedepan kita akan berubah menjadi Barenbang (Badan Perencanaan dan Pengembangan) Kementerian Ketenagakerjaan. Oleh karena itu pada kesempatan ini

mohon ijin Bapak Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat bahwa kami akan fokus yang kedepan jadi lebih membicarakan tentang Badan Perencanaan dan Pengembangan.

Pokok bahasannya adalah yang pertama, pendahuluan, kami ingin menggambarkan sedikit tentang bagaimana tugas dan fungsi dari Barenbang. Kemudian yang kedua adalah realisasi anggaran tahun 2014 yang merupakan realisasi anggaran dengan nama masih Badan Penelitian dan Informasi kemudian alokasi anggaran tahun 2015 yang sepenuhnya adalah alokasi anggaran untuk Barenbang kemudian bagaimana rencana capaian program dan penelitian tahun 2015 secara lebih terurai lagi serta penutup.

Barenbang ini terdiri dari Sekretariat Barenbang disini juga sudah hadir. Kemudian Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan, Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan ini adalah organisasi yang sebelumnya di Sekretariat Jenderal. Kemudian yang berikutnya adalah Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan dimana ini dari Balitfo sudah ada pada waktu Balitfo, kemudian Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagakerjaan juga ada sejak Balitfo, kemudian yang berikutnya adalah Pusat Pengembangan Sistem Informatika ini adalah organisasi baru tingkat eselon II yang melengkapi Barenbang dimana sebelumnya adalah setingkat eselon III dan ini diperlukan peningkatan karena salah satu persyaratan dalam rangka e-goverment adalah bahwa minimal yang menangani terkait dengan sistem informatika itu adalah selevel eselon II, oleh karena itu masuk di wilayah ini.

Tugas dan fungsi saya kira lewat saja, lalu yang berikutnya adalah proses bisnis Barenbang ini sebenarnya satu sama lain itu sangat terkait dimana titik centralnya adalah disini kami coba menggambarkan bagaimana tentang dukungan manajemen internal yang berada dibawah Sekretariat Balitfo dan juga dukungan eksternal, manajemen eksternal yang berada di Sekretariat Balitfo. Internal tentu saja berkaitan dengan lingkup unit eselon II dilingkungan Barenbang dimana masing-masing punya kegiatan, Pusitbang untuk melakukan penelitian dan pengembangan, Pusdatin untuk melakukan penyusunan data dan informasi, Pusat PPK untuk menyusun rencana tenaga kerja makro dan menggerakkan penyusunan rencana tenaga kerja sektoral oleh kementerian dan lembaga serta rencana ketenagakerjaan itu yang harus disusun oleh perusahaan. Ini merupakan amanat daripada Undang-undang No. 13 tahun 2003 dimana tertera didalam Pasal 7 terkait dengan perencanaan tenaga kerja. Kemarin ketika Pak Menteri menyampaikan nawakerja dan nawakerja pertama yang disampaikan oleh beliau pada waktu hari Selasa yang lalu adalah penguatan perencanaan tenaga kerja nasional. Jadi Barenbang itu ujung pangkalnya adalah bagaimana nanti tenaga kerja itu terencanakan baik ditingkat nasional maupun ditingkat provinsi, kabupaten kota, serta ditingkat sektoral dan yang tentunya yang paling baik dan menjadi tujuan kita itu adalah semakin banyaknya di tingkat mikro yang dilakukan oleh perusahaan.

Apabila perencanaan tenaga kerja ini bisa kita susun dengan baik maka tentu saja nanti ada keseimbangan antara persediaan tenaga kerja di Indonesia sampai ke daerah-daerah maupun keseimbangan antara persediaan dan kebutuhan atau permintaan tenaga kerja. Kalau ini kita

bisa menemukan dua kegiatan ini menjadi seimbang maka kita akan bisa menjamin ketersediaan pasar kerja yang harmonis, pasar kerja yang baik.

Bapak, Ibu sekalian yang kami hormati.

Indikator IPK (Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan) sesungguhnya ada 9 dimana terdiri dari :

1. Berkait dengan perencanaan tenaga kerja ini yang kita ukur yang pertama.
2. Penduduk dan tenaga kerja,
3. Kesempatan kerja,
4. Pelatihan dan kompetensi kerja,
5. Produktivitas tenaga kerja,
6. Hubungan industrial seperti yang tadi dijelaskan oleh Dirjen Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
7. Kondisi lingkungan kerja,
8. Pengupahan dan kesejahteraan kerja,
9. Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

F-PKS (H. ANSORY SIREGAR, Lc.):

Pimpinan, interupsi Pimpinan.

Kalau menurut saya panjang lebar seperti ini sudah ada disini juga, Menteri juga sudah pernah menyinggung, saya kira langsung *to the point* saja. Sebenarnya sama juga dengan yang tadi saya lihat panjang lebar banget, yang langsung pembahasan kita sekarang mengenai anggaran APBNP.

Terima kasih, Pimpinan.

DIRJEN BALITFO:

Terima kasih, Bapak Pimpinan.

Bapak Pimpinan yang terhormat dan Anggota Dewan yang terhormat.

Saya langsung saja kepada gambaran realisasi anggaran tahun 2014. Realisasi tahun 2014 Badan Litbang dan Informasi ini masih menggunakan terminologi Balitfo Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dimana kita dapat menyerap 92,9% dan fisik 100%. Dilingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Balitfo menduduki realisasi terbaik kedua di lingkungan Kementerian Nakertrans. Kemudian yang berikutnya perencanaan tenaga kerja yang pada waktu itu ada di Setjen ini juga bisa merealisasikan khusus di unit eselon II ini ada 92,07% dan juga fisik 100%. Oleh karena itu capaian secara keseluruhan adalah fisik 100%, dan keuangan 92,9%.

Tidak tercapainya keuangan sampai 100% itu antara lain adalah karena adanya kebijakan-kebijakan misalnya dengan Surat Edaran Menteri PAN tentang peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja aparatur kemudian juga intinya adalah dilarangnya pembatasan adanya kegiatan pertemuan rapat di luar kantor serta beberapa efisiensi terkait kontraktual.

Bapak Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,

Ijinkan kami meneruskan langsung kepada Anggaran 2015 dimana total anggaran Kementerian Tenaga Kerja itu sebesar 4,2 trilyun diantaranya adalah akan mendukung pagu Barenbang di Kementerian Tenaga Kerja sebanyak Rp 76.957.476.000,- atau sekitar 1,81%. Rinciannya adalah ini asal muasalnya tadinya Balitfo sebesar Rp 98.782.485.000,- kemudian karena ada pembentukan Kementerian Desa dan seterusnya maka ada bidang trans 32,6 milyar lalu yang bidang Naker tertinggal 66,312 milyar. Lalu dengan adanya perpindahan unit perencanaan tenaga kerja yang memiliki anggaran 10 milyar maka ditambah lagi ada pusat pengembangan system yang belum ada anggarannya sebanyak 0 sehingga total Barenbang itu adalah Rp 76.957.476.000.-.

Oleh karena itu kami memerlukan dukungan Anggota Dewan yang terhormat, dalam rangka nanti APBNP perubahan itu adalah untuk mengisi kegiatan dan anggaran untuk pusat pengembangan system informasi ini yang uangnya berasal dari efisiensi dan penataan alokasi anggaran sehingga komposisinya adalah demikian, yang pertama adalah Sekretariat Barenbang sebesar 34,1 milyar, kemudian pusat perencanaan tenaga kerja 8,1 milyar, pusat data dan informasi 5,1 milyar, pusat penelitian dan pengembangan 6,4 milyar dan pusat pengembangan system informatika 22,9 milyar dengan jumlah yang tidak berubah sebesar 76.957.476.000,-.

Lalu secara singkat kami ingin menyampaikan rencana capaian program dan kegiatan tahun 2015 dimana program perencanaan, penelitian dan pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan itu didukung oleh anggaran sebesar Rp 76.957.476.000,- yang pada intinya adalah itu untuk mendukung 5 unit eselon II dilingkungan Barenbang dimana terkait dengan dukungan manajemen dan tugas lainnya itu sebanyak 7 output kemudian penyusunan perencanaan tenaga kerja sebanyak 4 output lalu pengelolaan data dan informasi ketenagakerjaan sebanyak 4 output serta penelitian dan pengembangan ketenagakerjaan sebanyak 4 output dan pengembangan system informatika, targetnya 3 output.

Sebagai kesimpulan adalah bahwa alokasi anggaran Barenbang Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2015 sebesar Rp 76.957.476.000,- yang dialokasikan pada 5 unit satuan kerja eselon II yang meliputi 5 kegiatan dalam format ketenagakerjaan. Kemudian yang kedua, kami mohon persetujuan Komisi IX DPR yang terhormat terhadap APBNP ini khususnya dalam rangka menata ulang alokasi anggaran yang mengikuti adanya perubahan organisasi baru.

Saya kira demikian paparan kami kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri dengan ucapan

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Kepala Badan Barenbang.Selanjutnya yang terakhir pada session ini kami persilakan kepada Dirjen PPK, selamat datang, Pak.

DIRJEN PPK:

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,

Mungkin paparannya belum siap, mohon maaf, pertama bahwa kami bekerja dibidang pengawasan ketenagakerjaan ini berdasarkan mengacu kepada objek pengawasan yang ada serta beberapa kendala yang kita miliki bahwa saat ini yang tercatat sesuai dengan Undang-undang 7 tahun 81 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan perusahaan yang terdaftar itu ada 271.791 perusahaan. Kemungkinan ini tidak termasuk yang kategori sektor yang disebut informal dari jumlah ini sekitar 70% masuk dalam kategori perusahaan kecil dimana jumlah tenaga kerjanya 50 kebawah.

Tentu acuan ini harus diimbangi dengan jumlah pengawas ketenagakerjaan yang saat ini ada di kita 2.097 orang sementara menurut roadmap yang ada sesuai dengan kapastias kerja pengawas setiap pengawas mampu menyelesaikan tugas-tugas pemeriksaan 5 kali sebulan atau 60 kali setahun maka kalau kita perhitungkan kapasitas dengan orang masing kekurangan sebanyak 2.483 inilah yang akan kita kejar sampai dengan akhir tahun 2019. Namun demikian untuk menjangkau seluruh objek ini tentunya selain menambah pengawas ketenagakerjaan juga nanti kita lakukan berbagai upaya mengefisienkan system penyelenggaraan pengawas ketenagakerjaan. Antara lain bahwa pengawas ketenagakerjaan saat ini memang tidak mampu menjangkau seluruh objek dengan alasan kekurangan pengawai pengawas. Ketika otonomi atau urusan pengawas ini berada di kabupaten kota bagi kabupaten kota khususnya pemekaran yang benar-benar tidak memerlukan adanya kegiatan pengawas otomatis wajib menyelenggarakan urusan ketenagakerjaannya didalamnya pengawasan. Inilah yang sering dilontarkan bahwa masih ada sekitar 108 kabupaten kota yang tidak memilik pengawas padahal kalau system pengawasan lebih bisa diefisiensikan itu sebetulnya tidak relevan untuk menjadi reasoning kekurangan pengawas.

Oleh karena itu sesuai dengan Undang-undang 23 tahun 2014 pengawasan akan diselenggarakan di provinsi kabupaten kota sub urusan pengawasan ketenagakerjaan. Artinya bahwa provinsilah nanti yang akan mengatur penyelenggaraan pengawas dimana diperlukan pengawas atau tidak. Sehingga bagi kabupaten kota yang kelebihan pengawas bisa diarahkan kepada daerah-daerah yang membutuhkan pengawas sesuai dengan spesifikasi daripada industry yang ada. Ini akan lebih efisien ketika dibanding dengan penyelenggaraan pengawasan yang oleh kabupaten kota yang merupakan urusan wajib dari setiap kabupaten kota dan

pengelolaan dan penetapan pengawas nanti berada di pusat. Dalam artian bahwa pengelolaan ini terbatas kepada pelatihan, penunjukan, penghitungan kebutuhan pengawas, pembinaan teknis, peningkatan profesionalisme dan membimbing jenjang karir sesuai dengan jabatan fungsional. Menteri Tenaga Kerja selaku pemegang mandat daripada pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan Undang-undang No. 3 tahun 51 nanti akan mendelegasikan kepemilikan petugas pengawas ini kepada gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Ini sebagai penganggar kemudian pencapaian program di tahun 2014 pengawasan ketenagakerjaan ini bisa dibidang memiliki 3 kegiatan yang generik ini hampir diseluruh dunia demikian kalau namanya pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan Konvensi ILO No. 81 tahun 47 yaitu kegiatan-kegiatan yang bersifat penerapan norma kerja dari pemeriksaan pengujian atas dasar perencanaan kebutuhan social ekonomi didaerah itu sampai kepada penyidikan. Yang kedua, adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat penyebarluasan norma dalam artian membimbing pelaku-pelaku usaha atau giat pengawasan agar mampu melaksanakan berbagai peraturan dibidang ketenagakerjaan. Yang ketiga adalah kegiatan pengembangan pengawasan ketenagakerjaan khususnya didalam pelibatan stakeholder utama maupun pihak-pihak lain yang mampu berperan didalam mengawasi atau membantu pihak-pihak untuk dapat melaksanakan peraturan perundang-undangan dengan efektif dan efisien.

Dalam kerangka 3 kegiatan generik itu ditahun 2014 yang kemudian nanti akan bergulir ditahun 2015 ada 3 karakteristik kegiatan yang kita laksanakan. Pertama, adalah kegiatan yang menyentuh masyarakat langsung antara lain penarikan pekerja anak 15.000 ini yang terintegrasi didalam program PKH yang dikoordinasi oleh TNP2K dibawah Wakil Presiden yang penarikannya dapat berhasil 100% dan tingkat melanjutkan kependidikan 98,2% masuk baik ke pendidikan formal maupun kependidikan non formal berupa paket A, B, maupun C. Selebihnya adalah pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh program Naker karena memang sudah tidak inline dengan kemampuan atau minat anak untuk sekolah. Kegiatan kedua yang menyentuh langsung masyarakat adalah membantu UMKM untuk menerapkan cara-cara bekerja sehat dan selamat, produktif dengan hasil produk yang layak dikonsumsi oleh masyarakat.

Ibu, Bapak sekalian,

Untuk bidang keselamatan dan kesejahteraan pekerja ini kita masih menghadapi kendala kultural dimana kalangan industri menganggap bahwa penerapan keselamatan dan kesejahteraan kerja itu masih cost bukan investasi didalam kerangka perlindungan umat manusia agar terhindar dari sebuah musibah kecelakaan kerja. Ini persoalan pokok. Oleh karena itu melihat komposisi pelaku ekonomi 70% ada di informal *economic activity* maka kita melakukan strategi bagi perusahaan-perusahaan besar kita tinggal awasi peraturan dibidang keselamatan kerja namun bagi perusahaan-perusahaan kecil yang memang tidak mampu dan menghidupi menopang kehidupan ekonomi nasional kita berikan bimbingan dengan kegiatan-kegiatan dari APBN. Misalnya dengan cara pemakaian gas tabung gas dan cara-cara kebersihan sejenis daripada memproduksi

suatu barang khususnya makanan, ini sasaran kita. Yang ketiga adalah melaksanakan amanat instruksi Presiden No. 15 tahun 2012 dimana Kementerian Tenaga Kerja untuk peningkatan social ekonomi para nelayan diberikan tugas pertama, melakukan pelatihan dan kedua, memberikan bimbingan terhadap keselamatan dan kesejahteraan kerja. Pada tahun 2014 kita memberika cara-cara nelayan untuk selamat didalam menjalankan pekerjaannya dengan pemakaian savety jacket kemudian cara-cara membaca cuaca secara kasar dan kemudian nanti ditahun 2015 akan kita tingkatkan menjadi sebuah pusat informasi keselamatan kerja bagi nelayan dibawah kita akan lakukan dengan Kementerian UKM.

Jenis kegiatan yang kedua, adalah peningkatan kapasitas pengawasan ketenagakerjaan yaitu melakukan penambahan pengawas berupa pelatihan. Di tahun 2014 dialokasikan anggaran 10 kali angkatan yang tahun-tahun sebelumnya mungkin ini hanya 2 angkatan, 3 angkatan, tetapi karena berbagai dukungan dari Anggota Dewan kemudian kebijakan untuk menambah pengawas kita lakukan 10 kali angkatan.

Namun perlu kami laporkan Ibu, Bapak sekalian bahwa dari alokasi 10 angkatan masing-masing 30 orang jadi 300 APBN ini hanya dapat menjaring peserta sebanyak 9 kali angkatan. Ini cukup mengherankan bagi kita ketika kita minta calon-calon pengawas dari kabupaten kota maupun provinsi kita mengalami kesulitan kandidat. Kemudian pada tahun ini juga melalui kerjasama dengan Provinsi Jawa Timur kita bisa menyelenggarakan pengawas satu kali angkatan dengan biaya dari APBD Provinsi Jawa Timur. Peningkatan kapasitas ini juga dilakukan dengan cara melakukan bimbingan-bimbingan teknis bagi pengawas ketenagakerjaan untuk lebih mampu penerapan bimbingan penerapan pasal-pasal utamanya bagi peraturan-peraturan baru atau kebijakan-kebijakan baru yang tertib sehingga ini sebagai upaya updating bagi pengawasan ketenagakerjaan. Kegiatan yang ketiga ditahun 2014 adalah penguatan operasional bahwa sesuai dengan konvensi dan undang-undang, negara wajib menyelenggarakan pengawasan ketenagakerjaan yang secara spesifik disebutkan menanggung seluruh biaya yang diperlukan didalam kerangka melakukan pemeriksaan sebagai contoh adalah transportasi.

F-PAN (M. ALI TAHER):

Ketua, interupsi.

Saya kesulitan mengikuti ini mana yang dimaksud itu.

DIRJEN PPK:

Tidak, yang kegiatan ini Pak yang masih satu yang di 2014.

F-PAN (M. ALI TAHER):

Jadi kita mengikuti agak susah ini, halaman berapa, apanya.

DIRJEN PPK:

Saya masih dihalaman 3, Mas.

F-PAN (M. ALI TAHER):

Yang ditayangkan sudah yang lain.

DIRJEN PPK:

Lanjut, 2014. Yang matrik halaman 3, slide 3. Kemudian saya lanjut ke kendala di slide 7 selama tahun 2014 kita mengalami kendala yaitu kegiatan efektif dapat dilaksanakan pada bulan April 2014 karena terlambat pencairan blokir dan revisi dipa. Yang kedua, anggaran yang diserap periode Januari-April 2014 terbatas pada belanja operational pegawai. Yang ketiga adanya penghematan anggaran sesuai dengan Inpres No. 4 tahun 2014 dan amanat Surat Menteri Keuangan No.S347/MK02/2015 hal perubahan pagu anggaran belanja KL dalam APBN tahun 2014. Pemotongan anggaran dipa revisi 2 ditandatangani 21 Juli 2014 sehingga ada sekitar 45 milyar yang tidak dapat kita laksanakan karena keterbatasan waktu sehingga capaian kami ditahun 2014 itu sekitar 71%. Yang keempat, adalah adanya pembatasan pelaksanaan kegiatan pertemuan rapat di luar kantor sesuai dengan Surat Edaran Menpan dan RB No. 11 tahun 2014 yang muncul di akhir-akhir tahun 2014. Kemudian adanya sisa anggaran tunjangan kinerja serta efisiensi atau sisa kontrak.

Tahun 2014 ijin mohon kalau bisa kami lewati sesuai dengan tadi sudah kami uraikan, saya langsung di tahun, rancangan capaian anggaran dan program kegiatan 2015. Program perlindungan tenaga kerja dan pengembangan system pengawasan ketenagakerjaan tahun 2015 pembagian antara pusat dan daerah itu kami melakukan dana disamping di pusat juga ada dekosentrasi di 34 provinsi dan 5 Balai Kartika dengan perincian bahwa total anggaran di 2015 setelah Pusat K3 bergabung dengan Ditjen Pengawasan Ketenagakerjaan sejumlah Rp 690.473.360.000,- dengan perincian yang dialokasikan ke pusat ada Rp 612.386.226.000,- yang didaerah yang nanti itu yang kami maksudkan untuk penguatan operasional itu sebesar Rp 78.087.134.000.-.

Program perlindungan tenaga kerja dan pengembangan system pengawasan ketenagakerjaan per kegiatan tahun 2015 meliputi program perlindungan tenaga kerja dan pengembangan system pengawasan ketenagakerjaan ini yang saya sebutkan tadi untuk meningkatkan kapasitas yang tersebar di 5 direktorat yaitu untuk kegiatan peningkatan kualitas teknis pemeriksa dan penyidikan norma ketenagakerjaan sebanyak 50,068 milyar kemudian peningkatan perlindungan pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak dengan target 16.000 penarikan pekerja anak sebesar 109,942 juta kemudian yang ketiga adalah peningkatan penerapan norma keselamatan dan kesejahteraan kerja sebesar Rp 21.133.000.000 kemudian peningkatan penerapan norma kerja dan jaminan social tenaga kerja sebesar 21,254 juta kemudian dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya pada Ditjen Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan termasuk upah, gaji, tujangan kinerja dan segala macamnya sebesar Rp 296.330.741.000,-. Kemudian peningkatan kualitas dan pengelolaan keselamatan dan kesejahteraan kerja ini yang dari pusat K3 sebesar Rp 191.743 juta.

Program perlindungan tenaga kerja dan pengembangan systemketenagakerjaan perlindungan, rincian jenis belanja itu terdiri dari belanja pegawai sebesar 7% kemudian belanja barang 57% dari anggaran 600 milyar tadi kemudian belanja modal sebesar 36 milyar. Program perlindungan tenaga kerja dan pengembangan system pengawasan ketenagakerjaan tahun 2015 kegiatan utama pengawas ketenagakerjaan:

1. Pemeriksaan norma ketenagakerjaan,
2. Penyelesaian kasus pelanggaran norma ketenagakerjaan,
3. Fasilitasi dan peningkatan teknis pemeriksaan dan penyidikan,
4. Sosialisasi jaminan social tenaga kerja baik BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan,
5. Penyusunan roadmap system pengawasan ketenagakerjaan berdasarkan Undang-undang No. 23 tahun 2014 yang harus berakhir pertengahan tahun ini,
6. Pelayanan pengujian kualitas lingkungan kerja, dukungan manajemen teknis Ditjen Pengawasan.

Kegiatan bagi masyarakat dan dinas di daerah:

1. Penarikan pekerja anak, tadi sudah saya sebutkan saya uraikan didepan, Bapak, 16.000 pekerja anak,
2. Sosialisasi ...(tidak jelas)..UMKM,
3. Pengadaan mobil reaksi cepat K3,
4. Peningkatan kapasitas pengawas ketenagakerjaan berupa diklat pengawas ketenagakerjaan ini ada alokasikan 90 orang artinya 3 angkatan, diklat spesialis bidang tertentu 90 orang atau 3 angkatan, kemudian bagi dukungan pengawas ketenagakerjaan berupa administrasi teknis kita didik 60 orang atau 2 angkatan, kemudian pejabat structural yang notabene saat ini transaksi perubahan pejabat dibidang pengawasan ketenagakerjaan structural khususnya di kabupaten kota itu begitu tinggi sehingga perlu kita kenalkan dengan hal-hal tugas fungsi pengawasan ketenagakerjaan.
5. Pengadaan sarana prasarana pengawas ketenagakerjaan,
6. Pengadaan alat uji K3, ini sarana kerja juga,
7. Penerapan budaya K3 bagi nelayan yang saya sebutkan tadi yang langsung untuk masyarakat,
8. Peningkatan kapasitas laboratorium 4 UPTP milik pusat K3 dan 14 UPTP provinsi,
9. Peningkatan SDM penguji baik di pusat maupun di daerah.

Program perlindungan tenaga kerja dan pengembangan system pengawas ketenagakerjaan tahun 2015 selanjutnya masih dihadapkan pada kendala yang dihadapi terkait dengan kebijakan yang diterbitkan akhir-akhir ini berupa:

1. Pemotongan anggaran perjalanan dinas dan paket meeting sebesar Rp 77.342.323.000,- ini nanti kita alihkan kepada usaha-usaha yang jelas capaiannya yang langsung membentuk kepada kebutuhan masyarakat.
2. Kegiatan pengawas ketenagakerjaan memerlukan dukungan anggaran perjalanan dinas dan rapat-rapat melihat nanti pelaksanaannya adalah di provinsi dan mengingat kondisi geografis

khususnya di daerah-daerah timur antara satu kota dan lain dan antar pulau begitu memakan biaya yang cukup tinggi.

3. Berpengaruh pada target pencapaian sasaran antara lain kalau pemotongan perjalanan dinas tadi itu terdapat target 16.000 penarikan pekerja anak, pemeriksaan perusahaan di kabupaten kota dan penyusunan roadmap.

Terakhir saya rasa inilah figur dari Direktorat Jenderal Pengawasan yang akan datang dimana pusat K3 sudah bergabung terintegrasi dengan Direktorat Jenderal yang tadinya berada di jajaran Sekretariat Jenderal sekarang berada di unit Direktorat Jenderal Pengawasan Ketenagakerjaan.

Demikian terima kasih, Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Dirjen.

Bapak, Ibu sekalian yang saya hormati,

3 unit eselon I telah menyampaikan penjelasan terkait dengan program yang akan dilaksanakan pada tahun 2015. Satu hal yang perlu kami sampaikan, apa yang disampaikan oleh Barenbang tadi itu sebenarnya tidak menggambarkan program. Sama sekali tidak menjelaskan apa yang dilakukan atau program apa yang dilakukan hanya menjelaskan unit mana menggunakan berapa. Ini menjadi sulit bagi komisi untuk mengetahui apa isi program dari Barenbang. Kalau Dirjen PHI terlihat programnya ada, target output-nya ada demikian pula Dirjen PPK juga menjelaskan apa programnya dan apa output yang diharapkan dan berapa anggarannya. Ini berbeda dengan Barenbang, tapi nanti terserah kawan-kawan bagaimana memberikan respon terhadap penjelasan dari Barenbang tersebut.

Bapak, Ibu sekalian yang saya hormati,

Sekarang kita masuk pada bagian selanjutnya yaitu pendalaman dari Anggota Komisi terkait dengan penjelasan-penjelasan tadi.

Pertama kami mulai dari sayap kiri, yang terhormat Bapak Ketut Sustiawan, kami persilakan.

F-PDIP (Ir. KETUT SUSTIAWAN):

Terima kasih, Pimpinan.

**Pimpinan dan Anggota Komisi IX yang saya hormati,
Pak Dirjen PHI, Dirjen PPK dan Balitfo serta jajarannya yang saya hormati,**

Pimpinan, yang pertama ingin saya sampaikan bahwa betul yang disampaikan Pimpinan, hari ini kita sudah 2 sesi melakukan acara ini untuk pendalaman, yang saya tangkap adalah bahwa seyogyanya kita membahas hari ini adalah APBNP Perubahan. Namun saya mendengar, menyimak dari 3 Dirjen hari ini juga tidak menggambarkan beberapa sesungguhnya anggaran APBN nya. APBN nya jadi perubahan, ada perubahan atau tidak, jadi kita tidak mendengar, itu yang pertama. Termasuk didalamnya dari Barenbang tadi misalnya ada perubahan Satker, kalau ada pengalihan anggaran dari Satker satu ke Satker yang lain ini gimana. Sehingga saya ingin melalui Pimpinan supaya ada kejelasan apa yang mau disampaikan pada forum kali ini. Jadi masih ada beberapa Satker atau unit kerja Dirjen yang akan kita dengarkan nanti paling tidak kita mendapat gambaran mengenai perubahan anggarannya.

Yang kedua, kalau kita bicara anggaran, jenis belanjanya juga kita tidak dapat, berapa anggaran belanja pegawainya, belanja modal, berapa belanja barang, kita tidak dapat juga, belum lagi kalau melihat anggaran berdasarkan fungsi kegiatannya juga tidak dapat. Sehingga tadi apa yang disampaikan, Pimpinan, melalui Pimpinan, mohon kedepannya ini juga bisa lebih baik terutama bahan ini jangan begitu kita rapat baru dikasih ini. Jadi kita ini baru sekilas gitu loh kita ingin melakukan pendalaman, tapi kalau ada teman-teman tadi ya mungkin kita semua juga akan merasa kesulitan mengikuti ini.

Walaupun begitu saya ingin mencoba satu-satu Pak Pimpinan, apa yang telah disampaikan tadi saya apresiasi kepada ketiga Dirjen ini dan saya coba untuk melihat tadi secara umum seperti itu, secara umum bahwa kita belum mendapat gambaran perubahan-perubahannya ini. Sebelum membahas APBNP ini karena tadi juga didahului oleh evaluasi 2014, saya kira saya juga perlu mengulas sedikit untuk evaluasi saja dan kemudian APBNP ini mau kita bawa kemana 2015 nya sesungguhnya kalau saja ini lebih detail kita mungkin tidak bertele-tele, kita membahas perubahannya saja kalau mungkin, tapi karena ini perubahan, mungkin saja yang 2015 yang kemarin sudah dibahas kita bisa realokasi. Saya kira itu semangatnya seperti itu.

Pertama pada Dirjen PHI, tadi saya ingin mendapat penjelasan juga bahwa, yang pertama evaluasi soal 2014, dari ke Dirjen PHI, PPK sama bahwa keterlambatan penyerapan anggaran yang kecil ini hampir menyatakan bahwa ini ada terlambatnya pencairan pemblokiran dari Menteri Keuangan, kemudian efisiensi, saya kira itu yang disampaikan. Cuma saya tidak tahu dimana pemblokirannya jadi jangan-jangan kedepan begini lagi ini kalau penyerapannya kurang pemblokiran lagi. Jadi saya kira karena saya baru di Komisi IX jadi ingin juga mendapat gambaran kira-kira ada tidak program 2015 juga yang terkait seperti ini.

Terkait 2014 tadi, di Dirjen PHI ini, saya kira permasalahan cukup banyak tapi ada target-target yang mencapai kalau dari target realisasinya bukan keuangannya tapi realisasi fisik mungkin ini banyak yang diatas 100%. Kalau ada target realisasi fisiknya lebih dari 100% ini anggarannya darimana ini, kerja sosialkah atau dibebankan pada perusahaan. Saya kira ini perlu untuk dijelaskan.

Kemudian menarik salah satu hal kalau secara rincian saya tidak mendapat ini mohon melalui meja Pimpinan, melalui Pimpinan bahwa kita

ingin membahas Rancangan Undang-undang APBNP ini kejelasan per kegiatannya juga perlu jadi kita tahu ada program A anggarannya berapa, ...(tidak jelas)..ini kegiatannya diuraikan tapi kita tidak tahu berapa anggaran masing-masing kegiatan ini.

Ada tadi disampaikan bahwa mungkin ada di kegiatan konsolidasi pelaksanaan peningkatan intensitas pencegahan dan penyelesaian perselisihan dibidang industri, panjang nama kegiatannya. Yang dimaksudkan salah satunya agar buruh didalam melakukan kegiatan atau beracara di PHI ini bisa paham ya kalau sosialisasi saling belah pilih bagaimana bisa paham ini. Jadi sosialisasi yang sudah dilakukan ini agar paham jadi jangan paham beracara di persidangan tapi hendaknya paham terhadap aturan-aturan ketenagakerjaan ini itu yang paling penting saya kira sehingga perlu ada apakah didalam kegiatan ini juga sudah termasuk itu sosialisasisupaya jangan hanya paham beracara tapi tidak paham terhadap aturan-aturannya. Tadi juga banyak disinggung ini hal yang juga dirasakan belum cukup. Yang kemudian yang kedua, alokasi anggaran dekon, 34 provinsi, 33 provinsi mendapatkan anggaran ini tapi tidak tahu kriterianya untuk memberikan alokasi angka berdasarkan lokasi, berdasarkan kebutuhan, atau kebijakan.....(tidak jelas) karena dari serapan dari realiasi anggaran juga tidak mencerminkan itu. Jumlah yang sini lebih besar, jumlah penduduknya yang besar juga tidak tergambar jadi artinya ini perlu ada kejelasan soal dana dekonsentrasi yang anggarannya ...(tidak jelas)..itu yang Dirjen PHI.

Kemudian dari Barenbang, ini memang kalau saya lihat yang dulunya Balitfo, Balitfo jadi Barenbang jadi yang ...(tidak jelas)...saja mulai di pilih Pusat Perimbangan Sistem Informasi jadi saya kira anggaran mana yang digeser ini, anggaran mana yang di geser sehingga pusat perimbangan system informasi kita ini bisa mendapatkan 22 milyar. Jadi kalau dia di 15 ada pergeseran anggaran di Satker mana pergeseran anggaran ini kemudian kegiatan apa, program apa yang digeser anggarannya. Kemudian kita juga menjadi jelas tahun 2015 sudah dilakukan pembahasan sekarang ada pergeseran dengan pengesahan beberapa bidang ini yang ...(tidak jelas)...Kementerian Desa...(tidak jelas)...Ini saya kira perlu diberikan penjelasan lebih detail sehingga anggaran penyusunanmilyar ini menjadi jelas jadi tidak hanya sekedar gambarankalau seperti ini rasanya saya belum bisa memahami dari tidak bisa berpendapat setuju atau tidak dengan anggaran ini.

Yang terakhir untuk PPK mohon dijelaskan soal anggaran ini juga yang terkait dengan adanya penarikan pekerja anak. Penarikan pekerja anak, ini sesungguhnya bakal ...(tidak jelas)...berapa besar, 2014 ada 15.000 kemudian 2016 direncanakan juga 16.000 pekerja anak ini membutuhkan anggaran berapa kalau totalnya sudah disampaikan ini ada program perlindungan tenaga kerja dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan. Jadi saya kira ini tambah lagi kalau disini adalah peningkatan perlindungan pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak. Jadi mohon bisa lebih detail dengan anggaran yang cukup besar saya kira 109 milyar.

Yang kedua adalah ini saya apresiasi saya mendukung kegiatan ini sosialisasi K3 bagi UKM tadi juga sudah di ...(tidak jelas)...Mungkin kalau bicara sektor, sektor lain juga saya kira membutuhkan ini sosialisasi K3

bagi pekerja, begitu juga kerja, saya kira 5.000 UMKM ini apakah dirasakan sudah cukup seluruh Indonesia, saya tidak mendengar apakah ada kelebihan tambahan anggaran atau tidak. Jadi langsung saja pada anggaran APBN sebesar 690 milyar total. Jadi saya kira hal-hal ini Pimpinan, yang ingin saya sampaikan, sekali lagi mohon kiranya ini bisa diberikan lebih rinci kalau hari ini tidak bisa secara lisan, saya kira kita perlu mendapatkan data yang lebih rinci terkait kegiatan-kegiatan ini terkait anggaran, saya kira apakah perubahan anggaran yang ini tidak adanya tambahan tapi mungkin ada pergeseran anggaran. Saya kira ini perlu juga dilakukan penyesuaian-penyesuaian.

Saya kira demikian, Pimpinan.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Selanjutnya Ibu Okky Asokawati.

F-PPP (Dra. HJ. OKKY ASOKAWATI, M.Si):

Terima kasih, Pimpinan.

**Pimpinan dan ...(tidak jelas)..yang saya hormati.
Bapak Dirjen....(tidak jelas)....**

.....(suara rekaman tidak jelas).....kaset ke 4

Yang dimaksudkan dengan non diskriminasi itu apa dan bagaimana programnya. Apalagi disini ada pemberdayaan pelaku HI dalam peningkatan kesejahteraan pekerja atau buruh, ini menarik sekali sebetulnya ketika kami diberikan informasi lebih jauh terkait dengan peningkatan kesejahteraan pekerja ini karena ketika kami tahu jumlahnya ada 4.100 orang itu dimana saja yang hendak ditingkatkan kesejahteraannya. Lalu Bapak tadi katakan saya dengar mengenai anggaran ke luar negeri kalau tadi tidak salah ada jumlahnya disini kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya yaitu 122 milyar. Pertanyaan saya, tapi tidak ada disini Pak disasaran, indikator atau target dalam nomenklatur untuk anggaran ke luar negerinya. Itu saya mohon penjelasan itu. Itu mungkin untuk Pak Dirjen PHI.

Kemudian untuk Balitfo, saya lihat anggaran Barenbang berdasarkan satuan kerja tahun 2015, tadi Pak Pimpinan sudah katakan tidak ada program-programnya padahal tadi ketika kami melakukan rapat dengan Pak Sekjen dan kami semua Komisi IX menyetujui yaitu adanya pengembangan sistem informatika, disini masuk didalam Balitfo di point yang kelima, Pusat Pengembangan Sistem Informatika sebesar Rp 22.982.718.000,- dengan 3 output. Nah itu 3 outputnya 3 output apa itu Pak karena tadi kami semua setuju bahwa memang perlu adanya Pusat Pengembangan Sistem Informatika ini IT tapi 3 outputnya kita tidak tahu ini

apa ini jumlahnya disitu. Dan untuk Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan Barenbang, point yang kedua, satuan kerjanya itu 8 milyar sekian, itu bagaimana perencanaan ketenagakerjaan. Kemudian outputnya itu 4 output, 4 output itu apa 4 output dan perencanaan ketenagakerjaan ini lalu bagaimana kaitannya nanti dengan MEA itu kan kami tidak perlu gitu ya.

Dan yang terakhir untuk Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, kalau tadi Bapak katakan bahwa sampai tahun 2019 Bapak membuat roadmap, saya menunggu roadmap itu Pak dimana negara kita masih membutuhkan adalah 2.483 orang. Kalau saya hitung Pak Dirjen, sekarang 2015 ke 2019 artinya 4 tahun artinya setahun kita perlu merekrut jumlahnya 621 orang tenaga pengawas. Sementara dari catatan Bapak terakhir disini untuk tahun 2015, Bapak hanya akan merekrut 90 orang. Sementara roadmapnya 2019 per tahunnya 621 orang. *Speechless* saya tidak ngerti mau bicara apa tolong Bapak terangkan saja.

Kemudian terkait dengan pekerja asing, ini mungkin juga karena kurangnya tenaga pengawas. Saya mau lihat dengan scope yang lebih kecil saja yaitu paramodel misalnya, kalau saya lihat sekarang saya amati banyak sekali panggung peragaan maupun majalah-majalah yang memakai model-model asing dan saya ingin tahu bagaimana dengan ijin kerja mereka karena saya tidak pernah lihat ada tenaga pengawas dari Kementerian Tenaga Kerja yang datang ke suatu peragaan busana, ngecek kek nanya atau ke agency karena jujur, banyak model-model kita yang sebetulnya secara kompetensi secara fisik tidak kalah. Jadi saya minta, ini scope yang lebih kecil mungkin di scope lain ada insinyur kek atau manajer jadi saya harap yang kasat mata dilihat di majalah misalnya di peragaan busana itu betul-betul tolong diperhatikan Pak, karena apalagi nanti MEA masuk ya haduh sedih sekali nanti tenaga kerja kita. Dan mengenai tahun anggaran 2014 kegiatan utama yang tidak dapat dilaksanakan sosialisasi K3 bagi nelayan. Penjelasannya memotong sehingga dipanya terbitnya terlambat sehingga kurang waktu lelang. Ini saya tidak ngerti Pak sistemnya, ketika melakukan sosialisasi K3 kok pakai lelang ya memang siapa yang melakukannya, saya mohon penjelasan saja, apa yang dilelang karena saya tidak paham mungkin saya mohon informasi supaya saya tambah ngerti ketika melakukan sosialisasi apakah ada pelelangan, apa yang dilelang kalau sosialisasi itu.

Dan yang terakhir untuk program perlindungan tenaga kerja dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan per kegiatan tahun 2015 disitu kodenya 0260809 program perlindungan tenaga kerja, pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan itu kegiatannya adalah 6 kegiatan. Tadi Bapak jelaskan pusat adalah sistem untuk pengawasan tenaga kerja ini. Sementara daerah adalah penyelenggaranya, pertanyaan saya, didalam kode 0260809 ini ada 6 kegiatan sistem apa yang akan dibangun dengan 6 kegiatan ini sementara penyelenggaranya kan daerah.

Kemudian saya juga tertarik dengan kode 2198 perlindungan pekerja perempuan, penghapusan pekerja anak itu ada 7 output, saya ingin tahu outputnya itu apa saja, begitu dan kalau toh tadi juga dikatakan mau akan ada penarikan pekerja anak, saya ingin tahu juga itu didaerah mana saja. Lalu disini juga ada pengadaan mobil URCK3 30 unit. Pertanyaan saya itu masuknya di kode yang mana disini tidak ada ini pengadaan mobil 30 unit

K3, apakah itu masuk dalam kode yang 1264, begitu. Dan ketika berbicara mengenai penerapan budaya K3 bagi nelayan 8.350 unit ini berupa apa sih, unitnya berupa apa. Penerapan budaya K3 bagi nelayan itu sebanyak 8.350 unit itu berupa apa penerapannya. Itu saja, terima kasih, Pimpinan.

Wabillahiwaltaufik Walhidayah.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

F-PG (ADITYA ANUGRAH MOHA, S.Ked.):

Pimpinan, interupsi.

Baik, terima kasih, Pimpinan.

Pertama bahwa tadi saya menangkap dua pandangan dari Pak I Gusti dan Ibu Okky, prinsipnya adalah sesungguhnya kita belum paham betul sesuai dengan apa yang menjadi kesimpulan kita pada saat Rapat Kerja bersama dengan menteri. Tadi pada saat rapat bersama dengan Sekjen dan Irjen itu kan sudah ada kesimpulan, di point nomor 7 itu jelas. Jadi Komisi IX ini meminta untuk ada rincian masing-masing rancangan program dan kegiatan agar kita jelas mengetahui mana-mana bagian dan postur anggaran yang kita sepakati tadi betul Bapak sampaikan soal bagaimana posisi perubahannya, penambahannya dimana dan tadi juga ditambahkan Ibu Okky bahwa ini banyak hal yang tidak sesuai, yang tidak kita ketahui dimana wujud yang kita akan sepakati. Ini sangat sulit ketika kita menyetujui postur anggaran yang kita tidak tahu wujudnya dimana. Ini kayak jelangkung kita jadinya Pimpinan, agak susah ini kita. Jadi kita butuh rincian, tentu kita menghargai apa yang telah disampaikan oleh Bapak-bapak Dirjen kita tentunya dengan harapan tentu ini lebih spesifik untuk kita membahas itu yang bisa kami sampaikan agar menjadi perhatian bersama kita Anggota, karena saya yakin ini akan seirama semua. Kita juga bingung ini, Ibu Okky saja agak bingung apalagi kita ini, kan begitu karena biasanya Ibu Okky yang paling teliti. Begitu Bu ya.

F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA):

Interupsi, Pimpinan.

Terima kasih, mungkin juga sama menguatkan, saya dari Fraksi PDI Perjuangan menguatkan apa yang disampaikan oleh Anggota sebelumnya, saya kira kita tidak perlu berpanjang lebar lagi tadi sudah begitu rinci disampaikan oleh Ibu Okky dan Pak Gusti, menurut saya kesimpulannya sama dengan, Ketut Gusti bukan Gusti Allah, jadi menurut saya tadi juga Ketua Komisi mengatakan akan ada pendalaman minggu depan dan kami, tepatnya saya, saya tidak bisa membahas anggaran begitu cepat dengan bahan yang baru saya terima. Dengan demikian saya usulkan rapat ini kalau boleh ya tidak terlalu panjang, langsung pada kesimpulan karena tadi sudah lengkap oleh Ibu Gusti, Ibu Okky disampaikan, saya kira. Jadi kita meminta ada rencana program yang lebih rinci lagi output-nya sama seperti Ibu Okky tadi outputnya apa, indikatornya apa, targetnya apa, itu disampaikan dengan lebih baik. Itu saja Pimpinan, terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, saya kira, terima kasih interupsi. Ini juga terlanjur terdaftar beberapa penanya, kalau semuanya sependapat seperti itu berarti saya kira kita selesaikan. Selanjutnya saya persilakan yang terhormat Pak Handayani. Sama, oke. Kemudian Al Mukarrom M. Ali Taher.

F-PAN (M. ALI TAHER):

Saya sepakat dengan beberapa catatan, pertama, dari maksud dan tujuan global visi anggaran tahun 2015 ini memang nampak tetapi dari sisi rinciannya itu memang perlu dilengkapi target-target khusus, tidak boleh misalnya angka global sekian milyar kemudian sekian orang tadi itu. Jadi saya kira secara umum sudah oke lah, pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Jadi saya kira kaidah-kaidah keuangan ini belum nampak didalam paper-paper ini Pak. Jadi saya kira memperkuat Ibu Diah Pitaloka, Ibu Oneng kemudian Ibu Pragawati Okky Asokawati semuanya sudah bagus ya tinggal persoalan dipertajam. Memang disini masih buram sekali meskipun saya, meskipun Sarjana Hukum tapi pernah belajar akuntansi, pernah ikut kursus-kursus gitu saya juga susah menangkapnya itu, ini terlalu parsial terlalu remang-remang kemudian tidak kelihatan aspek-aspek tujuan khusus didalam penganggaran itu sehingga susah untuk mengantisipasi bagaimana kalau itu persoalan teknis di lapangan. Saya kira ini saja tambahan dari saya jadi perkuatlah norma-norma keuangan itu kemudian memang ada kendala Ketua, ada kendala konstitusional yaitu MK mengatakan bahwa DPR memang tidak memberikan satuan tiga tidak diberikan tetapi kita boleh membedah program. Jadi memang angkanya tidak, jadi kita boleh membedah program meskipun secara substansi didalam program itu sudah ada angka-angka jadi kita mungkin MK dulu itu mungkin orang SH semua sehingga tidak ngerti keuangan tidak tahu kan teman-teman saya juga di MK itu. Jadi saya kira masa Anggota DPR itu tugasnya legislasi penganggaran dan, anggaran sendiri dibatasi kan lucu juga MK itu. Jadi ya susah lah jadi oleh karenaitu kita kembali pada norma-norma keuangan tetapi mari teman-teman Dirjen sudah karya kerjanya sudah bagus meskipun saya lihat ada beberapa paper saya tidak perlu sebut tidak enak lah ini memang ada yang tergesa-tergesa saya lihat ini, ada fotocopy juga terbalik-balik itu juga saya paham tetapi saya tidak perlu ngomong lah karena kita ini equal dalam pengertian kebersamaan yang kita mau cari jadi bukan kesalahan. Oleh karena itu pertajam sekali lagi pertajam, pertajam dengan pendekatan norma kemudian satuan kegiatan itu betul-betul disampaikan, jangan takut Pak, disampaikan saja meskipun DPR tidak semua baca kecuali ahlinya. Jadi serahkan saja nanti kita lihat Pak Ketua ya, ini programnya disampaikan termasuk rupiahnya satu, satu, Bu Diah mempertajam ya, jadi Pak Ketua, saya mendukung teman-teman yang semuanya itu sehingga saya tadi juga begitu mau ngomong apa yang mau saya ngomong padahal saya sudah siap-siap tetapi ya memang itu lah kendala administratif kita.

Terima kasih, Saudara Pimpinan, kita cepat bikin rumsan saja biar saya, biar cepat.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Ali.
Selanjutnya yang terhormat.

F-GERINDRA (Tgk. KHAIDIR):

Interupsi.
Baik, Pak Ketua, terima kasih.
Mungkin tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh rekan-rekan sebelumnya.

Yang kami hormati segenap Dirjen yang hadir.

Dengan bahan yang kita terima Bapak, Ibu sekalian tadi disampaikan bahwa kalau memang kita nanti hari Senin kita akan lebih breakdown daripada apa yang kita terima tentu ini juga harus disampaikan kepada beberapa Dirjen yang belum menyerahkan bahan itu agar bahannya tidak seperti ini, itu breakdownnya sampai rupiahnya, apa kegiatannya. Ini kan kelihatannya yang ditulis disini Bapak-bapak sekalian kan induk-induknya saja, anak-anaknya tidak kelihatan, jadi kita kalau perlu sampai cucunya kelihatan. Jadi dengan demikian, saya kira, dia tidak akan beli atau tidak akan jual kucing dalam karung kita beli itu barang aslinya, Pak, karena kalau yang disini itu mungkin beda-beda tipis dengan apa yang dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya. Maka kita ingin sekali lagi Pak Ketua, induk sampai cucunya, kita mau lihat.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya Ibu Amelia.

F-NASDEM (AMELIA ANGGRAINI):

Terima kasih, Pimpinan.
Pada dasarnya saya sepakat dengan apa yang telah disampaikan oleh rekan-rekan tadi, sebagian besar telah disampaikan oleh rekan Ibu Okky Asokawati, saya mohon kepada Bapak Dirjen dan jajarannya untuk kemudian pada paparan pendalaman nanti lebih jelas memberikan target output dan roadmapnya kepada kami sehingga kita bisa menuntaskan APBNP ini secepatnya. Demikian Pak Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya Ibu Irma.

F-NASDEM (IRMA SURYANI):

Sama, saya sepakat juga dengan semuanya, hanya ingin titip saja ini ke Pak Simbolon Pak Dirjen, saya tidak melihat anggaran penguatan untuk mediator kita Pak, di PHI Pak, itu saya tidak lihat padahal itu penting sekali Pak ada sekitar masih sekitar 2.000 lebih Pak, 2.353 mediator kita kekurangan Pak di seluruh Indonesia. Tolong itu saya titip besok hari Senin itu harus ada anggarannya Pak.

Kemudian juga anggaran terkait masalah sosialisasi syarat-syarat pengajuan penyelesaian perselisihan saya juga tidak lihat, padahal itu yang menjadi momok bagi semua buruh ketika dia pengajukan kasusnya ke PHI. Itu juga tidak ada anggarannya saya lihat disini, ini dikemanain ini anggaran, dimana masuknya karena tidak terlihat. Jadi besok harus ada anggaran itu Pak ya, karena dengan tidak adanya anggaran itu bagaimana Bapak bisa membantu buruh untuk bisa menyelesaikan hubungan industrial mereka di PHI.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Tidak ada lagi? Semuanya hampir sama lah ya beda-beda tipis lah.

F-PD (SITI MUFATTAHAH,PSI):

Nambah Pimpinan, sedikit.

Terima kasih, Pimpinan.

Saya tambahkan memperkuat dari apa yang disampaikan teman-teman tadi, untuk bahan hari Senin rupanya sudah nyampe ke kita masing-masingnya, tetapi isinya tidak seperti yang diharapkan. Jadi kalau untuk hari Senin bisa kita bekerja dengan baik lagi kira-kira kapan bahan ini kami terima, tidak mungkin hari Senin kemudian kita bahas langsung, kapan kita harus pelajari itu. Mungkin sebelum hari Senin harus kita sudah terima itu Pimpinan dan kalau dulu pernah terjadi itu kita bisa kita mendapatkan bahan itu di rumahnya masing-masing diantarkan ke rumahnya masing-masing, mungkin itu, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Cukup? Oke saya kembali, kami persilakan kepada Pemerintah mulai dari Dirjen PHI untuk memberikan respon.

DIRJEN PHI DAN JAMSOSTEK:

Terima kasih.

Pak Pimpinan yang kami hormati,

Kami dari yang pertama dulu mungkin dari Pak Ketut, terima kasih Pak Ketut, banyak hal yang bisa menjadi perhatian kami didalam rangka

penguatan hubungan industrial. Jadi mengenai rincian anggaran per program dan per kegiatan kami akan sampaikan nanti. Kemudian mengenai keterlambatan pencarian blokir yang tadi kami sampaikan memang dirasakan itu menjadi salah satu yang menyebabkan serapan kita tidak bisa mendekati 100%. Ini antara lain misalnya adanya attensi dari BPK dan KPK terkait dengan pemberian subsidi program atau Bansos itu dihentikan di 2014 sehingga kita juga mempengaruhi itu. Kemudian yang kedua juga adanya perubahan-perubahan dalam rangka kebijakan Pemerintah sehingga membuat keterlambatan didalam pelaksanaan program-program yang sudah kami persiapkan sebelumnya.

Kemudian yang berikut Pak Ketut, mengenai target-target capaian yang melebihi 100% ini memang pada realitanya demikian, jadi misalnya tadi yang penyusunan peraturan perusahaan karena kita melakukan bimbingan teknis maupun sosialisasi itu kan dari hasil pengamatan kami maupun laporan kondisi dilapangan kalau pesertanya misalnya ada 60 perusahaan kemudian yang 60 perusahaan karena kita minta juga menginformasikan menyampaikan kepada rekan-rekan yang belum membuat PP maupun PKD misalnya ini menjadi alat kita juga memanfaatkan kehadiran mereka sehingga ada penambahan-penambahan x plus-plus dan sebagainya. Dengan demikian artinya sosialisasi yang kami lakukan itu betul-betul bermanfaat walaupun target kita tadi misalnya 2.000 misalnya ternyata dalam pelaksanaannya melebihi dari 2.000. Demikian juga mengenai kepesertaan ketika kita melakukan sosialisasi kepengurusan SPSB mereka ini yang penting mereka hadir dan diakui Pak, jadi walaupun yang kami undang misalnya 1 SP itu 2 atau 3 orang, yang datang bisa lebih dari 3 orang. Ini juga menjadi perhatian kita bersama, inilah akhirnya memberikan kontribusi nilai positif kepada realisasi dari target-target yang kita inginkan. Ini 2 contoh yang kami sampaikan, Pak Ketut.

Kemudian bagaimana kejelasan anggaran nanti kami akan lengkapi, kemudian kegiatan sosialisasi pemahaman beracara, terima kasih Pak Ketut, Bapak dan Ibu, ini memang satu program yang baru yang kita inginkan karena memang dalam prakteknya teman-teman kita para pekerja buruh, boro-boro Pak mereka memahami peraturan perundangan substansi yang sekian banyak, kita sendiri pun kadangkala tidak tahu bagaimana mekanisme atau beracara ketika di Pengadilan Hubungan Industrial. Jadi kita masuk dilangkah pertama dulu di pintu besarnya bagaimana teman-teman itu bisa memahami dulu melakukan beracara di Pengadilan Hubungan Industrial. Baru kedua, ada juga program kita bagaimana pengetahuan kita.

F-GERINDRA (ROBERTH ROUW):

Interupsi, Ketua.

Bagaimana kalau kita langsung saja kesimpulan, Saudara Ketua. Kita sudah dengar tadi semua, juga pertanyaan semua sudah sepakat untuk langsung kesimpulan, jadi jawabnya nanti saja, Ketua. Saya kira itu.

KETUA RAPAT:

Ya, Pak Robert, sebelum diambil kesimpulan itu hak Pemerintah untuk memberikan respon singkat. Jadi itu mekanismenya seperti itu, ada tanggapan dari peserta, Pemerintah berkewajiban dan berhak menyampaikan respon. Tapi kami minta supaya lebih fokus. Silakan.

DIRJEN PHI DAN JAMSOSTEK:

Maaf, kalau begitu Pak Pimpinan, kami kira tadi detail satu per satu, berarti tadi dari Pak Ketut sudah bisa kami selaraskan dengan tadi Ibu Okky. Kemudian secara kesimpulan lagi yang bisa kami sampaikan dari substansi PHI dan Jamsos adalah tadi mengenai yang persentase Bu Okky, kita memang ada keinginan penyelesaian dispute tadi tidak dibawa ke ranah ke PHI ke pengadilan. Inilah bagian grand desain kita supaya hasilnya yang lebih baik ada kesepakatan bipartit. Ini yang lebih kita inginkan kedepan didalam program-program hubungan industrial ketenagakerjaan.

Saya pikir itu tadi terkait dengan mengenai perjalanan ke luar negeri, Bapak dan Ibu, memang kami tidak secara rinci menyampaikan disini tapi masuk didalam kegiatan ataupun didalam program dukungan manajemen. Itu yang kami sampaikan barangkali. Kemudian tadi dari Bu Okky, sementara itu lanjutnya Bu Irma, terima kasih banyak ini walaupun Bu Irma tadi sedang keluar sebetulnya dalam rencana kita 2015 juga sudah memprogramkan bagaimana revitalisasi maupun peningkatan kualitas teman-teman kita yang disebut dengan mediator sebagai pelaku yang memberikan pemahaman dengan fungsi 3 yaitu pembinaan, kemudian menyelesaikan dan memberikan membangun sistem-sistem. Ini kedepan kita ingin tidak saja mediator itu sebagai pemadam kebakaran tapi juga lebih kepada pembinaan supaya tidak terjadi perselisihan maupun PHK untuk rasa dan sebagainya.

Kesimpulannya Bapak dan Ibu sekalian, dalam rangka mediator ini sebagai jabatan fungsional yang paling utama kita juga mengalokasikan merencanakan pendidikan pelatihan kepada calon-calon mediator dengan satu angkatan 30 orang dan tahun 2015 kita rencanakan 5 angkatan, berarti 150 orang padahal kita membutuhkan lebih kurang 2.300 mediator nanti dikurangi lagi dengan yang pensiun dan sebagainya, sepertinya plus-plus lagi.

Satu hal tadi kami menyampaikan dukungan kita bersama kami harapkan adalah membangun Pengadilan Hubungan Industrial yang betul-betul adil maka kita akan melakukan seleksi hakim adhoc di tahun ini. Barangkali itu Bapak dan Ibu yang kami hormati yang bisa kami sampaikan dari sisi pembinaan hubungan industrial dan pembinaan sosial.

Terima kasih, Bapak Pimpinan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih. Kepala Badan, kami persilakan.

DIRJEN LITBANG:

Ijin Pak, singkat saja.

**Bapak Pimpinan dan Ibu Pimpinan yang saya hormati.
Bapak, Ibu Anggota Dewan yang terhormat.**

Yang pertama adalah terima kasih kami atas dukungan terhadap program dan kegiatan dilingkungan Barenbang tahun 2015. Kemudian yang kedua, terkait dengan APBNP untuk 2015 itu memang sebagaimana disampaikan oleh menteri *...(tidak jelas)...* yang lalu bahwa hanya Dirjen Bina *...(tidak jelas)...* dan Dirjen *...(tidak jelas)...* yang mendapatkan anggaran tambahan namun demikian, hampir semua dari kami itu akan diberi perubahan karena ada realokasi dan sebagainya. Termasuk itu juga bahwa tentu rincian dari perubahan anggaran Balitfo seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ketut juga, kami siap untuk menjelaskan lebih lanjut termasuk penjelasan rinciannya Pak, jadi kami akan siap menjelaskan lebih lanjut untuk hal-hal yang berkaitan dengan rincian.

Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas dukungan Bapak dan Ibu sekalian.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.
Dirjen PPK, kami persilakan.

DIRJEN PPK:

Terima kasih, Pimpinan.

Mohon Pimpinan kami menambahkan... *...(tidak jelas)...* Pak Ketut bahwa sebagaimana disampaikan Kepala Badan tadi memang Dirjen PPK tidak ada perubahan anggaran yang pada dasarnya bahwa untuk program 2015 itu hampir sama apa yang telah di, samalah dengan yang disahkan oleh Anggota Dewan yang terdahulu. Kemudian penjelasan anggaran penarikan pekerja anak dan data bahwa kami menjalankan program penarikan pekerja anak ini terintegrasi dengan program PPKPKH (Program Keluarga Harapan) tadi saya sampaikan bahwa itu dibawah PNP2K dengan menggunakan data terpadu jadi keluarga sangat miskin kemudian pendekatannya adalah pendekatan kesehatan, pendekatan sosial kemudian pendekatan edukasi dan segala macam.

Kalau menurut ada data itu dan berbagai struktur yang ada di Indonesia ini sekarang ini masih ada sekitar 1,7 juta yang anak yang tidak dalam dunia pendidikan, artinya kalau dia tidak menganggur dirumah ya dia berada ditempat kerja apapun pekerjaannya itu, membantu orang tua atau lain sebagainya. Kemudian memang prioritas sesuai dengan konferensi ILO 182 mengenai *...(tidak jelas)...* yang masuk kategori ini ada

sekitar 400.000. Capaian kita hingga saat ini memang masih rendah terkait memang kebutuhan anggaran yang sangat terbatas. Kami juga diharuskan untuk mengambil menyesuaikan suatu keseimbangan pengadaan anggaran ini dengan kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan kami, tidak mungkin ini kota pos-kan didalam suatu kegiatan sementara fungsi lain akan tertinggal.

Dukungan untuk UMKM kalau data dari UMKM hingga saat ini ada 50 juta unit UMKM berdasarkan Undang-undang UMKM yang ada di kita dari 217.000 itu ada 70% nya kecil dan menengah dan sekali lagi bahwa memang satuan tiga yang kami terima memang sedemikian sehingga kami harus mempertimbangkan keseimbangan tadi termasuk untuk tambahan atau geseran-geseran ini sudah kami sangat pertimbangkan. Ibu Okky, mengenai pemblokiran karena apa, kita sama-sama tahu pada periode yang lalu untuk melalui review **...(tidak jelas).....** yang dari DPR sama-sama terlambat. Kita paham semua itu mengenai itu sampai dengan April akhirnya proses di anggaran akhirnya, kita mengalami kendala di Komisi IX. Ini saya katakan, saya sampaikan secara detail dan terbuka ini yang berpengaruh termasuk pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan harus dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Menuju roadmap **...(tidak jelas)...** sekarang ini ada kebutuhan **...(tidak jelas)...** per tahun kenapa 90. Satu, kita mengalami kesulitan kandidat bahkan jujur Bu, bahwa roadmap ini belum selesai kita kerjakan karena kami masih melakukan konsultasi dengan UKM segala macam dan dimungkinkan disitu suatu cara-cara rekrutment baru termasuk langsung ke perguruan tinggi-perguruan tinggi karena spesifikasi **...(tidak jelas)....** Kemudian juga kita belum selesai mengenai rekayasa sistem pengawasan. Sebetulnya roadmap itu angka bisa lebih berkurang ketika sistemnya lebih efektif termasuk penarikan kunjungan daerah pengawas di provinsi kemudian memberikan suatu instal ulang daripada sistem penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan **...(tidak jelas)...** tenaga pengawas juga pernah datang ke peragaan atau agen-agen, kami **...(tidak jelas)...** bahwa konsentrasi pengawas saat ini memang ada di industri khususnya manufaktur kecuali mandat-mandat konvensi yang sudah diratifikasi seperti pekerja anak, kemudian sekarang konspirasi ke Jaminan Sosial. Untuk Impresariat kita sudah masuk dan kita sudah menebangkan kebijakan untuk Impresariat dengan sebuah perijinan bahwa kekuatan ini periode yang lalu kami sudah pernah melakuka permohonan deportasi minimal untuk sekitar 600 an tenaga yang bekerja di impresariat seperti penyanyi barito segala macam tapi untuk model, mudah-mudahan kedepan kami **...(tidak jelas)...** untuk ikut **...(tidak jelas)...** termasuk sebetulnya pemain-pemain olah raga profesional asing ini juga harusnya mendapatkan perhatian tetapi memang kapasitas yang kami miliki belum sampai menjangkau kesana. Mudah-mudahan nanti kedepannya kami lebih mampu kesana.

Sosialisasi K3... **...(tidak jelas)...** kok pakai lelang segala macam, ini sekaligus untuk UMKM yang sosialisasi K3 untuk UMKM bahwa kami memberitahukan cara-cara menerapkan keselamatan dan kesejahteraan kerja apakah itu untuk nelayan atau untuk UMKM. Kalau untuk nelayan itu yang saat ini kita lakukan, kita memberikan life **....(tidak jelas)...** untuk melakukan sosialisasi kami cara pakainya seperti ini ketika kami pada

ombak ini bagaimana, terus kami cara berenang bagaimana dan nanti akan kita tingkatkan menjadi pusat badan informasi untuk membaca data awal kemudian nanti akan kita kembangkan menjadi resew terbatas bahkan nanti akan kita kembangkan sebagai tempat pelatihan....(tidak jelas)....

Barang-barang ini yang harus diadakan Bu, termasuk kepada penjual gorengan di sekolah, UMKM, penjual bakso dan segala macam kita memberikan cara-cara yang benar, pemahaman yang benar terhadap pemakaian tabung gas 3 kg. Dalam kesempatan itu kami juga memberikan sekaligus mendorong konversi pengakuan gas kami memberikan pakai gas 3 kg plus regulator dan seluruhnya berdasar SNI dan...(tidak jelas)...dan inilah yang kita berikan kepada masyarakat, maksudnya masyarakat langsung caranya demikian tetapi tidak hanya sebatas itu tetapi bagaimana memakai plastik ketika meramu kemudian pemanasannya sampai seberapa, kemudian kalau pakai pemanasannya itu jarak yang diambil kemudian bahan baku yang bisa beracun misalnya taruh dimana, segala macamnya itu. Itu yang memerlukan waktu lelang-waktu lelang untuk pengadaannya itu.

Enam, pengembangan sistem perincian penarikan ...(tidak jelas)...sekarang ini masih masuk di kelompok pendukung, Bu. Kami laporkan juga bahwa saat ini kami sudah mengusulkan ke Kementerian Keuangan untuk memecahdipa yang ada di kami dari 1 dipa menjadi 6 dipa. Nanti akan didampingi satu dipa lagi yang sekarang ini sudah tersendiri dan dari Pusat K3. Mungkin nanti kalau sudah disana bisa dipilah-pilah sesuai dengan Tupoksinya akan kelihatan sehingga output-output. Kami akan susulkan nanti mengenai output-ouput dari sekian kegiatan itu seperti contoh untuk penerapan norma kerja ada 4 output katakan ketaatan didalam penempatan norma penempatan tenaga kerja asing. Kemudian penempatan tenaga kerja luar negeri, pentaatan terhadap norma itu yang pertama, pentaatan norma mengenai jaminan sosial, pentaatan norma, sama semua tapi per bidang yang berbeda terhadap kebebasan...(tidak jelas)...pentaatan terhadap norma hubungan kerja, pemakaian waktu kerja dan waktu istirahat. Ini adalah suatu kegiatan-kegiatan dengan output-output tersendiri. Tetapi nanti secara rinci kami bisa sampaikan masalah itu.

Pak(tidak jelas)...dan Pak Ali, ya kami akan mengikuti apa yang diminta oleh Anggota Dewan, kami akan secara terbuka, kami agenda ini kami berpikir beserta program dan kalau kedepan apabila bisa didalam pelaksanaannya bisa kita kolaborasikan dengan Anggota Dewan itu merupakan hal yang positif bagi kami, nanti memerlukan kebutuhan perubahan didalam pelaksanaan karena menurut pengalaman kami aktivitas yang didukung oleh Anggota Dewan menjadi strong di daerah. Mengapa demikian, kami yakin bahwa Bapak, Ibu sekalian didaerah punya jaringan. Itulah justru kami manfaatkan kegiatan yang dari menjadi besar dan berpengaruh di masyarakat.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Cukup ya, kita simpulkan.

**Bapak, Ibu sekalian yang saya hormati,
Pak Dirjen serta jajaran.**

Bagian terakhir dari RDP ini kita akan mengambil kesimpulan, adadari kesimpulan dan saya bertanya kepada internal komisi untuk minta persetujuan untuk penyempurnaan.

1. Komisi IX DPR RI meminta Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Badan Perencanaan dan Pengembangan dan Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawas dan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia untuk memberikan rincian yang...(tidak jelas)...rancangan perubahan dan kegiatan kepada Komisi IX DPR RI serta memperhatikan secara sungguh-sungguh masukan dan saran-saran RDP Komisi IX DPR RI yang disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat hari ini.
2. Komisi IX DPR RI meminta kepada Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Badan Perencanaan dan Pengembangan dan Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia untuk memintakan alokasi anggaran dalam rangka penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan dan sosialisasi program Peraturan Perundang-undangan dan kegiatan di sektor ketenagakerjaan dengan menerapkan representasi Anggota Komisi IX DPR RI berdasarkan aspirasi daerah.
3. Komisi XI DPR RI akan mengagendakan Rapat Kerja dengan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia untuk mengambil keputusan terkait pembahasan RAPBNP tahun 2015 Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Badan Perencanaan dan Pengembangan dan Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

Jadi itu 3 kesimpulan dengan rasa...(tidak jelas)...point 3 itu ditentukan....(tidak jelas)...saya kira itu poitnya jadi keputusan akan diambil didepan bersama-sama dengan Menteri Tenaga Kerja dalam 1-2 hari kedepan.

Kawan-kawan, Bapak, Ibu sekalian yang saya hormati,

..(tidak jelas)..

Ya Pak Ketut.

F-PDIP (Ir. KETUT SUSTIAWAN):

Ya, ini masalah nomenklatur saja, hari ini ...(tidak jelas).....yang dicantumkan di keputusan rapat ini biar jelas gitu apa nomenklatur yang dipakai.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Kepala Badan.

BARENBANG:

Terima kasih, Pak.

Kami menyarankan Barenbang karena sudah ada Peraturan Presiden No. 18 tahun 2015 dimana organisasi .. **...(tidak jelas).....**

KETUA RAPAT:

...(tidak jelas)...

BARENBANG:

Nanti sedang melekat di kementerian.

KETUA RAPAT:

Jadi Pak Ketut, sudah betul? Cukup ya.

Saya persilakan kepada Pak Dirjen dan Kepala Badan terhadap kesimpulan ini, bisa diterima?

DIRJEN PPK:

Atas nama kawan-kawan, Kementerian PHI dan **...(tidak jelas)...**kami mengucapkan terima kasih atas rapat pada sore hari ini dan kami menerima terhadap kesimpulan yang telah diputuskan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih kami mengucapkan *Alhamdulillah* kesimpulan RDP antara Komisi IX dengan eselon I Kementerian Ketenagakerjaan yaitu Dirjen PHI, Kepala Badan Barenbang dan juga Dirjen PPK dapat kita sahkan kesimpulannya.

(RAPAT:SETUJU)

Baik, Bapak, Ibu sekalian,

Sebelum kita akhiri **...(tidak jelas)...**terserah kami persilakan, siapa yang mewakili.

DIRJEN:

Terima kasih, Pimpinan.

Atas nama rekan-rekan kami menyampaikan terima kasih atas masukan-masukan yang diberikan, mudah-mudahan(tidak jelas)...Anggota Dewan yang terhormat kami masih dapat mengarahkan kegiatan-kegiatan lebih fokus kepada kebutuhan masyarakat.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Dirjen.

Bapak, Ibu sekalian,

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, RDP pada sore hari ini, kami ...(tidak jelas)...kita tutup.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 17.10 WIB)

**Jakarta, Februari 2015
a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,**

Ttd,

**MUHAMMAD YUS IQBAL, SE
NIP. 196707171993031006**